



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI HANDAYANI
2. Jabatan : STAF AHLI MENTERI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
3. NHK : 21798

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 216 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Bangunan Seluas 7 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m²/40 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m²/162 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 83.267.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 349.652.500



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.432.919.500
III. HUTANG	Rp.	180.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.252.919.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.